FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

**Maria Maria1) Desi Indriasari2) Nurhasanah Nurhasanah3)**

1-3 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

[mariamardjuki@polsri.ac.id](mailto:mariamardjuki@polsri.ac.id)

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris faktor-faktor yang berkontribusi terhadap alokasi belanja modal pada 34 provinsi di Indonesia. Data diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi tahun 2016-2018. Determinan alokasi belanja modal meliputi, PAD, dana perimbangan, SiLPA, dan rasio ruang fiskal. Data dianalisis menggunakan teknik regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara bersama-sama keempat faktor tersebut berkontribusi terhadap belanja modal sebesar 69,8%. Secara parsial, PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dengan adanya kajian ini diharapkan berdampak pada manajemen pemerintah yang andal dan bersih. Manajemen pemerintah yang bersih menjadi harapan masyarakat/publik dalam kaitannya dengan layanan publik yang berkualitas.

**Kata Kunci** : PAD, dana perimbangan, SiLPA, rasio ruang fiskal

**FACTORS AFFECTING THE PROVINCIAL GOVERNMENT IN INDONESIA'S CAPITAL EXPENDITURE ALLOCATION**

***Abstract***

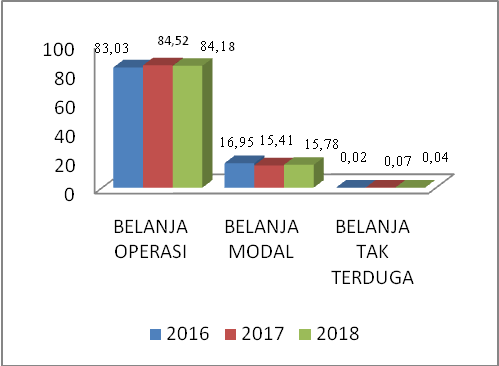
*This research aims to empirically the factors that contribute to the allocation of capital expenditures in 34 provinces in Indonesia from 2016 to 2018. Data obtained from the 2016-2018 Provincial Government Financial Reports or LKPD. Determinants of capital expenditure allocations include, PAD, balance funds, SiLPA, and fiscal space ratio. Data analyzed was performed by using multiple regression. The result of study showed that PAD, balance funds, SiLPA, and fiscal space ratio simultaneously gave 68.9% effect on capital expenditure allocations. Partially, SiLPA has no influence on the allocation of capital expenditures. This study is expected to have an impact on reliable and clean government management. Clean government management is the hope of the community public in relation to quality.*

***Keywords:*** *PAD, balance funds, SiLPA, fiscal space ratio*

# PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Belanja dapat dianggarkan setelah ada kepastian atas sumber pendanaannya (Abdullah dan Rona, 2015). Belanja dibedakan menjadi belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga. Merujuk pada PP No.71/2010 (PSAP No.02), belanja modal adalah pengeluaran angggaran untuk perolehan aset yang memiliki manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun periode akuntansi). Belanja modal mencakup belanja tanah, gedung, bangunan, irigasi, jaringan, dan lainnya.

Berikut ini, proporsi belanja untuk masing-masing kelompok pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2016-2018 (gambar 1.1).



Sumber: bps.go.id (data diolah)

**Gambar 1**

**Struktur Belanja Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2018**

Berdasarkan gambar 1, belanja operasi pada seluruh provinsi di Indonesia terus mengalami peningkatan tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 belanja operasi mencapai 83,03% dan meningkat menjadi 84,18% di tahun 2018. Di sisi lain, belanja modal mengalami penurunan dalam periode 2016-2017. Pada tahun 2016 belanja modal 16,95% dan mengalami penurunan menjadi 15,41% tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 belanja modal mengalami kenaikan lagi menjadi 15,78%. Sementara belanja tak terduga berfluktuatif selama tahun 2016-2018.

Rendahnya alokasi belanja modal dan penurunan terhadap alokasi belanja modal, menunjukkan belum optimalnya upaya pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik. Alokasi belanja modal direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, agar pemerintah daerah mampu menyediakan pelayanan publik yang memadai, diperlukan alokasi belanja modal yang lebih tinggi (Martini dan Dwirandra, 2015). Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, pemerintah pusat terus menghimbau agar pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja modal sebesar 30 persen (keuda.kemendagri.go.id).

Belanja modal pemerintah daerah (pemda) dapat dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pinjaman dan lain-lain. Dengan adanya alokasi PAD ke dalam anggaran belanja modal diharapkan pemda akan dapat membangun daerahnya menjadi lebih baik dengan menggali potensi pendapatan lokal yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Nurzen dan Riharjo (2016), bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) juga memberikan kontribusi bagi belanja modal pemda. Hal ini sebagaimana dinyatakan Mardiasmo, untuk mempercepat pembangun-

an di daerah, mulai tahun 2017 DAU dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, minimal 25% dari yang diterima daerah ([www.ekbis.sindonews.com](http://www.ekbis.sindonews.com), 2017).

Tanjung (2009) menyatakan, kelebihan SiLPA yang cukup besar mengindikasikan bahwa pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik. Hal ini berbeda dengan temuan penelitian Mentayani dan Rusmanto (2013), Sugiyanta (2016), bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Sejalan dengan temuan Mentayani dan Rusmanto (2013), Sugiyanta (2016), Darwanto dan Sari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Ketiga temuan ini mengindikasikan pentingnya alokasi belanja modal untuk berbagai kepentingan publik. Oleh karena itu, pemda sebaiknya mengubah komposisi belanja daerah yang selama ini digunakan untuk kegiatan operasi yang relatif kurang produktif ke belanja modal

Selain PAD, dana perimbangan,dan SiLPA, ruang fiskal juga menggambarkan pendapatan masih dapat digunakan untuk kegiatan sesuai kebutuhan daerah. Semakin meningkat rasio ruang fiskal suatu daerah, maka semakin meningkat pula alokasi belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dengan besarnya nilai ruang fiskal yang ada, maka kemungkinan belanja modal yang dilakukan suatu daerah akan tinggi (DJPK, 2011).

Sehubungan dengan uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap alokasi belanja modal pada 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2016 - 2018.

# TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

**PAD**

PAD merupakan dana pembiayaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. Merujuk pada PP No. 71/2010, PAD bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

**Dana Perimbangan**

UU No. 33/2004 Pasal 1 (18) menyatakan dana perimbangan sebagai dana yang bersumber dari APBN, dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No.55/2005, menegaskan tujuan dana perimbangan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dalam PPNo.71/2010 dinyatakan dana perimbangan terdiri dari DAK, DAU, dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

**SiLPA**

Dalam peraturan menteri dalam negeri No.13/2006 pasal 137 disebutkan bahwa SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;

b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;

c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

Berdasarkan PP No. 71/2010, SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi Pendapatan-LRA, belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

**Rasio Ruang Fiskal**

Rasio dimaksud merupakan rasio besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan yang sesuai dengan kebutuhannya (DJPK, 2011). Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah tersebut untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan prioritas seperti pembangunan infrastruktur. Efektivitas penggunaan anggaran di suatu daerah juga menunjang terciptanya ruang fiskal yang cukup dalam pembangunan suatu daerah.

**Belanja Modal**

Merujuk pada PP No. 71/201, “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Katagori belanja modal, yaitu: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, irigasi, dan Jaringan; Belanja Modal Fisik Lainnya.

**Kerangka Pemikiran dan hipotesis**

**H5**

**PAD (X1)**

**Dana Perimbangan (X2)**

**SiLPA (X3)**

**Alokasi Belanja Modal (Y)**

**Rasio Ruang Fiskal (X3)**

**H4**

**H3**

**H2**

**H1**

**H5**

**PAD (X1)**

**Dana Perimbangan (X2)**

**SiLPA (X3)**

**Alokasi Belanja Modal (Y)**

**Rasio Ruang Fiskal (X3)**

**H4**

**H3**

**H2**

**H1**

**Keterangan** :

: Pengaruh secara Parsial

: Pengaruh secara simultan

Gambar 2

Kerangka Pemikiran

**Hipotesis Penelitian**

H1: Terdapat pengaruh PAD terhadap alokasi belanja modal.

H2: Terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal.

H3: Terdapat pengaruh SiLPA terhadap alokasi belanja modal.

H4: Terdapat pengaruh rasio ruang fiskal terhadap alokasi belanja modal.

H5: Terdapat pengaruh PAD, dana perimbangan, SiLPA, dan rasio ruang fiskal terhadap alokasi belanja modal.

H6: Terdapat pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan

# METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif verifikatif yang mengkaji hubungan kausalitas secara terstruktur, faktual, dan akurat hubungan antar variabel dependen terhadap variabel independen dengan uji statistik. Penelitian ini difokuskan pada determinan alokasi belanja modal pada provinsi di Indonesia yang terdiri dari PAD, dana perimbangan, SiLPA, dan rasio ruang fiskal. Unit pengamatan dilakukan untuk 34 provinsi selama tiga tahun (20116, 2017, dan 2018). Data diperoleh berdasarkan LKPD dari BPK RI. Analisis data dilakukan dengan teknis analisis regresi berganda.

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Hasil Penelitian**

**a.Hasil Analisis Regresi Berganda**

Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1**

**Hasil Uji Koefisien Regresi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | | | |
| Model | | Unstandard Coeff | | Std. Coeff | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 4.456 | 2.224 |  | 2.004 | .048 |  |  |
| PAD | -.038 | .063 | -.058 | -.610 | .544 | .379 | 2.636 |
| Dana Perimbgn | .712 | .122 | .608 | 5.815 | .000 | .317 | 3.150 |
| SiLPA | .122 | .045 | .224 | 2.717 | .008 | .512 | 1.955 |
| Rasio Ruang Fiskal | .166 | .052 | .215 | 3.191 | .002 | .766 | 1.306 |
| a. Dependent Variable: Belanja Modal | | | | | | | | |

Sumber: *Output* SPSS,versi 26 (2020).

Persamaan regresi pada penelitian ini berdasarkan tabel 1 adalah:

ABM = 4,456 - 0,058 PAD + 0,608 DANPER+ 0,224 SiLPA + 0,215 RRF

Keterangan:

ABM : Alokasi Belanja Modal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DANPER : Dana perimbangan

SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

RRF : Ratio Ruang Fiskal

Hasil pengujian regresi selanjutnya ditampilkan dalam tabel 2.

**Tabel 2**

**Hasil Uji Regresi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Variabel | Koefisien  Regresi (β) | R2 | *Adjusted* R2 |
|  | Konstanta | 4.456 | .712 | .698 |
| X1 | PAD | .058 |
| X2 | DANPER | .608 |
| X3 | SiLPA | .224 |
| X4 | RRF | .215 |  |  |

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil uji koefisien determinasi disesuaikan pada tabel 2 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai a*djusted* *R Square* adalah 0,698. Hal ini berarti 69,8% variasi belanja modal dijelaskan oleh variabel PAD, dana perimbangan, SiLPA, dan rasio ruang fiskal sedangkan sisanya 30,2% dijelaskan oleh sebab-sebab di luar model.

**Uji Hipotesis**

**Uji F**

Hasil pengujian signifikansi simultan (uji-F) dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3**

**Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANOVAa** | | | | | | |
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 32.881 | 4 | 8.220 | 51.231 | .000b |
| Residual | 13.318 | 83 | .160 |  |  |
| Total | 46.199 | 87 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Belanja Modal | | | | | | |
| b.Predictors: (Constant), Rasio Ruang  Fiskal, SiLPA, Dana Perimbangan, PAD | | | | | | |

Sumber : *Output* SPSS,versi 26 (2020)

Hasil uji signifikansi simultan (uji-F) pada tabel 3 terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa PAD, dana perimbangan, SiLPA, dan rasio ruang fiskalsecara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal.

**Uji t**

Hasil pengujian signifikansi parsial (uji-t) dapat dilihat pada tabel 1.

Hasil pengujian (tabel 1) menunjukkan bahwa :

1. Variabel PAD memiliki nilai t hitung sebesar 0,610. Diketahui berdasarkan t tabel nilai df (n-k) = 97, dan nilai t tabel dengan signifikansi 0,05 yaitu 1,98472. Oleh karena nilai t hitung < t tabel (-0,610 < 1,98472) maka dapat disimpulkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan signifikansi 0,544.
2. Variabel dana perimbangan memiliki nilai t hitung sebesar 5,815. Diketahui berdasarkan t tabel nilai df (n-k) = 97, dan nilai t tabel dengan signifikansi 0,05 yaitu 1,98472. Oleh karena nilai t hitung > t tabel (5,815 > 1,98472) maka dapat disimpulkan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
3. Variabel SiLPA memiliki nilai t hitung sebesar 2,717. Diketahui berdasarkan t tabel nilai df (n-k) = 97, dan nilai t tabel dengan signifikansi 0,05 yaitu 1,98472. Oleh karena nilai thitung > t tabel (2,717 > 1,98472) maka dapat disimpulkan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
4. Variabel rasio ruang fiskal memiliki nilai t hitung sebesar 3.191. Diketahui berdasarkan t tabel nilai df (n-k) = 97, dan nilai t tabel dengan signifikansi 0,05 yaitu 1,98472 .Oleh Karena nilai t hitung > t tabel (3.191 > 1,98472) maka dapat disimpulkan rasio ruang fiskal berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil koefisien korelasi dan determinasi parsial (r2) dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4**

**Koefisien Korelasi dan Determinasi Parsial**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Koefisien Korelasi Parsial** | **Koefisien Determinasi Parsial (r2)** |
| X1 | -0,067 | 0,44% |
| X2 | 0,538 | 28,94% |
| X3 | 0,286 | 8,17% |
| X4 | 0,331 | 10,95% |

Sumber: *Output* SPSS,versi 26 (2020)

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh PAD terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Nilai t hitung < tabel (0,610 < 1,98472) dan signifikansi lebih besar dari 0.05 (0.544 > 0.05) maka hipotesis pertama (H1) ditolak. Artinya PAD secara parsial tidak berpengaruh signifikan (0,44%) terhadap alokasi belanja modal. Hal itu menunjukkan bahwa naik atau turunnya PAD di 34 Provinsi tidak memengaruhi alokasi belanja modal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wandira (2013), Maria (2017) bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal itu menunjukkan bahwa provinsi dengan PAD yang besar cenderung tidak memiliki belanja modal yang besar. Hal ini disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja operasional. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Andrian (2017).

**Pengaruh Dana perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal**

Nilai t hitung > tabel (5,815 > 1,98472) dan signifikansi lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05) maka hipotesis kedua (H2) diterima. Pada penelitian ini, dana perimbangan ysng terdiri dari: DAU, DAK, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil sumber daya alam merujuk pada PP No.71 Tahun 2010, secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di 34 provinsi di Indonesia tahun 2016-2018.

Dana perimbangan, penerimaan daerah bersifat transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan terbagi dua, yaitu: dana bersifat umum *(block grant*) dan dana bersifat khusus (*specific grant*). Dana perimbangan *block grant* adalah dana milik daerah yang dapat digunakan pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan sendiri untuk pemanfaatan dana tersebut. Dana *spesific grant* kemanfaatannya sudah ditentukan untuk mendanai kegiatan tertentu yang sudah ditetapkan dan tidak boleh digunakan untuk selain kegiatan dimaksud. Penelitian ini tidak membedakan kedua jenis dana perimbangan terbut. Temuan penelitian membuktikan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pemerintah provinsi di Indonesia sebesar 28,94%.

**Pengaruh SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal**

SiLPA memiliki nilai t hitung sebesar 2,717 dan nilai t tabel dengan signifikansi 0,05 yaitu 1,98472. Oleh karena nilai t hitung > t tabel (2,717 > 1,98472) maka dapat disimpulkan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima. Artinya SiLPA secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal itu menunjukkan bahwa naik atau turunnya SiLPA pada tingkat pemerintah provinsi di Indonesia akan memengaruhi alokasi belanja modal. Penelitian Wibisono & Wildaniati (2016) juga membuktikan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

SiLPA tahun berjalan (sebagai komponen penerimaan pembiayaan) merupakan realisasi SiLPA tahun sebelumnya. Artinya, SiLPA merupakan penerimaan yang secara otomatis diterima pada awal tahun berjalan sebagai akibat dana pada tahun sebelumnya tidak habis dibelanjakan. Anggaran belanja modal (yang menghasilkan aset tetap) sering menjadi objek yang dimanfaatkan untuk memenuhi *selfinterest* para pembuat keputusan anggaran. Dalam Permendagri yang mengatur tentang penyusunan anggaran ditegaskan untuk menghindari pengalokasian anggaran belanja modal dalam perubahan anggaran. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penambahan alokasi untuk belanja modal dalam perubahan anggaran masih tetap besar. Pada penelitian ini, kontribusi SiLPA terhadap alokasi belanja modal sebesar 8,17%.

**Pengaruh Rasio Ruang Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal**

Rasio ruang fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bisa atau bebas digunakan pemerintah daerah untuk mendanai program/kegiatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) yaitu DAU, DAK dan Dana Penyesuaian serta Dana Darurat, dan belanja yang sifatnya mengikat yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga. Setelah itu, angka tersebut dibagi dengan total pendapatan.

Berdasarkan hasil penelitian, rasio ruang fiskal memiliki t hitung sebesar 3.191. Berdasarkan t tabel dengan signifikansi 0,05 yaitu 1,98472 < 0,05. Hal ini menunjukkan secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan positif antara ruang fiskal terhadap alokasi belanja modal. Ruang fiskal yang terdapat pada pemerintah provinsi di Indonesia saat ini masih sangat terbatas. Ini dikarenakan sebagian besar pendapatan yang masih dapat digunakan cenderung dialokasikan untuk belanja operasi. Oleh karena itu, dengan memperbesar ruang fiskal daerah untuk belanja modal tentu sangat penting karena dapat menjadikan perekonomian dan pembangunan menjadi lebih baik dan maju. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Martini dan Dwirandra (2015) yang menunjukkan ruang fiskal memiliki pengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal. Artinya untuk mengalokasikan belanja modal, pemerintah daerah patut mempertimbangkan ruang fiskal yang tercipta pada tahun sebelumnya. Kontribusi rasio ruang fiskal sebesar 10,95% terhadap alokasi belanja modal dan signifikan.

**Pengaruh PAD, Dana perimbangan, SiLPA, dan Rasio Ruang Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal**

Secara bersama-sama PAD, dana perimbangan, SiLPA, dan rasio ruang fiskal berkontribusi terhadap belanja modal sebesar 69,8%. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penganggaran belanja modal harus didasarkan pada keyakinan adanya sumber penerimaan untuk mendanai belanja tersebut. Hal ini membentuk pemahaman pada pemerintah daerah bahwa apabila ingin melakukan perubahan anggaran belanja modal, maka perubahan atas komponen-komponen yang menjadi sumber penerimaan harus dipastikan dulu. Perubahan atas PAD tidak dapat dipastikan apakah terjadi karena terlalu rendah ketika menetapkan target, misalnya mengikuti asas minimal untuk penentuan target PAD dan SiLPA akhir tahun lalu, atau karena perubahan asumsi (misalnya kebijakan pemerintah pusat, khususnya dana perimbangan berupa DBH). Demikian halnya ruang fiskal yang memberi peluang bagi perintah untuk menggunakan pendapatan yang masih bias/bebas digunakan untuk mendanai program/kegiatan.

# SIMPULAN

Hasil penelitian ini memberi dampak bagi manajemen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya meningkatkan PAD akan memberikan kontribusi bagi alokasi belanja modal, sehingga pemerintah provinsi tidak tergantung pada dana APBN dalam membiayai kebutuhannya. Temuan penelitian ini, secara bersama-sama, keempat faktor PAD,dana perimbangan, SiLPA, dan rasio ruang fiskal berkontribusi sebesar 69,8% terhadap alokasi belanja modal. Faktor yang paling dominan adalah dana perimbangan sebesar 28,94%.

# REFERENSI

Abdulah, Syukriy dan Riza Rona. 2015. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal: Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. *Makalah Dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi ke-II*, IAI Wilayah Jawa Timur, di Universitas Kanjuruhan Malang, 29-30 April 2015.

Andrian, Yusuf dan Agus Samekto. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa”. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Volume 10. Nomor 2. PP 139-152.

Darwanto dan Yulia Yustika Sari 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*.Makasar 26-28 Juli 2007.

DJPK. 2011. *Deskripsi dan Analisis APBD.* Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Hidayat, M. F. dan Ghozali Maski (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur).

Maria. 22017. Determinan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*. Juli 2017. Vol.1 No.2.

Martini, Kadek dan A.A.N.B. Dwirandra. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 10 (2): 426-443.

Mentayani, Ida dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota/Kabupaten di Pulau Kalimantan. *InFestasi*, *9*(2), 91-102.

Nurzen, Miardi dan Ikhsan Budi Riharjo. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2014”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 5. Nomor 4. Halaman 1-16.

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

\_\_\_\_\_\_\_. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang* *Dana Perimbangan*.

\_\_\_\_\_\_ . 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Sugiyanta. 2016. Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 14. No.1

Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. *Accounting Analysis Journal*. Vol 2 No. 1.

Wibisono, Norharibnu dan Arini Wildaniati. 2016. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal”. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Volume 5. Nomor 2. ISSN:230-4747